

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pembangunan Ekonomi**

###### **a. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah mengembangkan perekonomian melalui berbagai usaha yang dilakukan dalam suatu perekonomian sehingga semakin banyak dan berkembangnya perusahaan, infrastruktur, taraf pendidikan, dan teknologi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan harapan untuk menambah kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendapatan, dan semakin tingginya kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup> Pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan dengan cara pembangunan kemakmuran ekonomi negara.<sup>45</sup>

Istilah pembangunan ekonomi berbeda dengan ekonomi pembangunan, tetapi antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan mempunyai hubungan. Ekonomi pembangunan adalah ilmu ekonomi yang ada dalam suatu bidang studi yang mempelajari masalah yang terjadi di negara berkembang serta kebijakan yang perlu

---

<sup>44</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 3

<sup>45</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 1

dibuat dan diterapkan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan dalam analisisnya memperhatikan:<sup>46</sup>

1. Proses pembangunan yang didalamnya terdapat ciri-ciri dari perubahan kegiatan ekonomi
2. Pembangunan ekonomi yang dalam peranannya terdapat faktor-faktor penting

b. Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi adalah kesenjangan. Kesenjangan menjadi permasalahan di berbagai negara, salah satunya di negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan ekonomi dapat memicu berbagai permasalahan ekonomi lainnya seperti bertambahnya penduduk miskin, bertambahnya pengangguran, meningkatnya tingkat kejahatan, menurunnya kualitas pendidikan, dan menurunnya daya beli masyarakat.<sup>47</sup>

Permasalahan dalam perekonomian menjadikan pembangunan ekonomi penting untuk diprioritaskan. Pembangunan ekonomi tidak sekedar berguna untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan dalam jurang kemiskinan, akan tetapi dapat mengurangi kesenjangan dari ketersediaan infrastruktur yang mumpuni dan antar sektor yang ada dalam suatu daerah. Meminimalkan kesenjangan dalam pembangunan

---

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses . . .* hal. 3

<sup>47</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam . . .* hal. 10

ekonomi tidak sekedar mengejar dari sisi pertumbuhan, akan tetapi dapat diarahkan untuk melihat ukuran pemerataan.<sup>48</sup>

Permasalahan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar mengarah pada material, akan tetapi terdapat segi spiritual dan moral yang sangat berperan, pembangunan spiritual dan moral harus berbaur dengan pembangunan ekonomi, kemudian di dalam Al-Qur'an disebut dengan *tazkiyahan-nafs*<sup>49</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syams ayat 7-10:<sup>50</sup>

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ

مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya:

*Demi jiwa serta penyempurnaanya (ciptaan)Nya (7), maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan (8), Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu) (9), dan Sungguh rugi orang yang mengotorinya (10).*

Al-Qur'an Surat Asy-Syams ayat 7-10 menyebutkan bahwa setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi, Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptaannya

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 11

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 20-21

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 595

yang sempurna, kemudian Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia.<sup>51</sup>

Pembangunan materi tanpa diikuti dengan pembangunan maka tidak mengakibatkan keadilan. Pembangunan yang berkeadilan mengharapkan penggunaan sumber daya yang efisien dan adil, tidak akan mungkin jika tidak diterapkan tanpa diikuti dengan dimensi moral ke dalam dunia perekonomian, sehingga pentingnya moral dalam pembangunan ekonomi agar terciptanya pembangunan yang adil dan efisien.<sup>52</sup>

Pembangunan dalam visi Islam mengarah kepada efisiensi dan pemerataan. Efisiensi yang maksimal ditandai dengan tercapainya alokasi sumber-sumber daya jika jumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dapat diproduksi sesuai dengan tingkat stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan. Efisiensi dapat dicapai pada kemampuan saat mencapai hasil kinerja yang dapat diterima secara sosial tanpa menimbulkan ketidakseimbangan di bidang makroekonomi dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan tercapainya pemerataan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan individu dengan sumber daya secara memadai dan pembagian kekayaan dan pendapatan yang merata.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam . . .* hal. 21

<sup>52</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 9

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 9

## 2. Ekonomi Wilayah

### a. Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan program ataupun proyek pada perencanaan pembangunan salah satunya adalah dimensi wilayah.<sup>54</sup> Aspek wilayah menjadi perhatian bagi daerah dalam rangka pembangunan ekonomi di masing-masing daerah agar pembangunan dapat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.<sup>55</sup>

Pembangunan wilayah melalui konsep perencanaan wilayah merupakan suatu kelanjutan tindakan dari kegiatan yang telah direncanakan dengan didasari berbagai pertimbangan seperti adanya perbedaan karakteristik, ciri, permasalahan, dan kepentingan dari masing-masing wilayah atau daerah dengan turut campur tangan pemerintah pada tingkat wilayah. Perencanaan wilayah dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu wilayah yang mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan saling berkaitan sebagai upaya dalam peningkatan kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk menyatukan faktor-faktor ekonomi seperti sumber daya alam, sumber

---

<sup>54</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengembangan Wilayah: Konsep, dan Teori Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal. 1.

<sup>55</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 152

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 153

daya manusia dan teknologi dengan menggunakan pertimbangan kemampuan dari daya tampung lingkungan di masing-masing daerah. Konsep dari pengembangan wilayah adalah memperkecil ketimpangan dan pertumbuhan antar wilayah. Wilayah menurut PP RI Nomor 47 Tahun 1997, merupakan ruang yang merupakan suatu kesatuan geografis beserta unsur yang terdapat dengan kaitannya yang batas dan sistem yang telah ditentukan dengan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.<sup>57</sup>

Pengembangan merupakan upaya untuk mengembangkan *stakeholders* dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi sebagai nilai tambah dari wilayah administratif atau wilayah fungsional untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang mendiami suatu wilayah. Pengembangan wilayah dalam jangka panjangnya memiliki target untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan dengan bersandarkan pada kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan daya tampung yang dimiliki suatu wilayah serta memanfaatkan instrumen yang ada.<sup>58</sup>

Tujuan dari perencanaan wilayah (*regional*) adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Mendorong proses pembangunan daerah yang bersangkutan
- 2) Mendorong pembangunan khususnya untuk daerah tertinggal

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 155

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 155-156

<sup>59</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 80

- 3) Mengurangi ketimpangan antar daerah
- 4) Meningkatkan daya dukung lingkungan
- 5) Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan
- 6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah yang bersangkutan.

b. Analisis Lokasi dan Ekonomi Spasial

Perencanaan wilayah pada dasarnya merupakan ruang lingkup dari bentuk perencanaan pembangunan yang didalamnya mencakup unsur tata ruang atau lokasi untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Jenis perencanaan pembangunan yang mengedepankan tata ruang dan lokasi sering disebut dengan spasial, karena variabel dan unsur dari pembangunan dirinci berdasarkan aspek lokasi dan tata ruang. Sasaran utama dari perencanaan pembangunan berbasis spasial adalah menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan keuntungan dari lokasi yang terdapat di daerah yang bersangkutan dan daerah tetangganya.<sup>60</sup>

Ekonomi spasial didalamnya terdapat teori lokasi yang menjadi teori dasar yang unsur utamanya adalah tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi. Teori lokasi memberikan kerangka analisis terkait dengan pemilihan lokasi dan analisis interaksi antar wilayah untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Ekonomi spasial dalam analisisnya digunakan dasar utama bagi munculnya ekonomi wilayah yang menekankan analisis kegiatan ekonomi pada aspek lokasi dan tata

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 79

ruang dalam rangka pengambilan keputusan sosial ekonomi dan bisnis.<sup>61</sup>

Faktor tata ruang dan faktor jarak dalam analisis ekonomi pada awalnya hanya bersifat sekunder jika dibandingkan dengan unsur waktu, akan tetapi lama kelamaan pembahasan terkait dengan lokasional dan spasial menjadi semakin menonjol seiring dengan pemikiran-pemikiran baru yang memusatkan perhatian pada tata ruang wilayah. Dimensi geografi dan lansekap ekonomi dimasukkan kedalam variabel tambahan penting pada teori pembangunan.<sup>62</sup>

Faktor tata ruang yang dimasukkan dalam teori ekonomi dan kerangka analisis dapat memperjelas terjadinya gejala-gejala ekonomi. Pertimbangan tata ruang menjadi penting dalam perencanaan pembangunan dapat diketahui melalui lima persoalan ekonomi wilayah, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Hubungannya dengan lansekap ekonomi yaitu berkaitan dengan dengan pola penyebaran kegiatan ekonomi pada tata ruag wilayah.
- 2) Konsep wilayah dalam analisis teoritik diartikan sebagai sub sistem spasial dari sistem ekonomi nasional.
- 3) Interaksi-interaksi antar wilayah
- 4) Analisis optimum atau keseimbangan antar wilayah.
- 5) Kebijakan perosoalan antar masing-masing wilayah.

---

<sup>61</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan . . .* hal. 21-22

<sup>62</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengembangan Wilayah: Konsep . . .* hal. 2-3

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 3-4

### 3. Makroekonomi

#### a. Pengertian Makroekonomi

Ruang lingkup yang dibahas dalam makro ekonomi meliputi masalah-masalah pokok dalam perekonomian, yaitu ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Analisis dalam teori makroekonomi mempunyai bahasan yang lebih global atau lebih menyeluruh. Makroekonomi dalam perhatiannya mengarah kepada tindakan secara keseluruhan oleh konsumen, kegiatan secara keseluruhan oleh pengusaha, dan perubahan secara keseluruhan oleh kegiatan ekonomi.<sup>64</sup>

Analisis-analisis yang terdapat dalam teori makroekonomi bersifat lebih menyeluruh atau lebih global. Fokus dari teori makroekonomi adalah tindakan dari konsumen yang menyeluruh, kegiatan keseluruhan yang dilakukan oleh pengusaha, dan perubahan-perubahan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisis-analisis yang terdapat dalam makroekonomi adalah:<sup>65</sup>

- 1) Kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh segi permintaan dan penawaran.
- 2) Masalah-masalah yang dihadapi oleh perekonomian
- 3) Campur tangan pemerintah dan perannya dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam perekonomian.

---

<sup>64</sup> Nursalam, *Buku Ajar Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1-2

<sup>65</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3 Cetakan 23*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 4

Ekonomi makro adalah alat bantu yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang bersifat menyeluruh dengan unit analisis agregat atau keseluruhan dan dengan menggunakan periode analisis (pemecahan) jangka pendek.<sup>66</sup> Pemerintah dalam melakukan tindakan untuk mempengaruhi variabel ekonomi agregatif dengan maksud mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya disebut dengan kebijakan ekonomi makro, meliputi:<sup>67</sup>

- 1) Tingkat kesempatan kerja yang tinggi;
- 2) Peningkatan produksi nasional yang tinggi;
- 3) Tingkat pendapatan nasional yang tinggi;
- 4) Keadaan perekonomian yang stabil;
- 5) Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang;
- 6) Distribusi pendapatan yang merata.

b. Kebijakan Makroekonomi

Permasalahan makroekonomi dapat diatasi dengan melakukan beberapa kebijaksanaan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Kebijakan fiskal

Kebijaksanaan fiskal merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam ekonomi makro dengan cara memanipulasi permintaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Kebijakan moneter

Kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan dalam perekonomian dengan cara pengendalian uang beredar

---

<sup>66</sup> Masyhuri Machfudz dan M. Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro: Dilengkapi dengan Contoh Soal dan Penyelesaiannya*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), hal. 2-3

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 4

<sup>68</sup> Detri Karya dan Syamri Syamsudin, *Makroekonomi: Pengantar untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2017, hal. 27-29

melalui kebijakan tersedianya kredit dan suku bunga sehingga dapat mempengaruhi penawaran uang beredar.

3. Kebijakan nilai tukar

Kebijakan nilai tukar merupakan kebijakan yang mempunyai pengaruh penting terhadap perdagangan dan keluar masuknya aliran modal.

4. Kebijakan perdagangan internasional

Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mengarah terhadap perdagangan luar negeri yang melengkapi kebijakan nilai tukar sebagai ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi arah dan kekuatan perdagangan luar negeri.

5. Kebijakan sisi suplai

Kebijakan sisi suplai adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan suplai agregat dalam perekonomian yang berupa produksi atau pengadaan barang dan jasa.

6. Kebijakan harga dan pendapatan

Kebijakan harga dan pendapatan merupakan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah dalam pengaturan harga barang dan jasa guna mempengaruhi tingkat upah.

7. Kebijakan tenaga kerja

Kebijaksanaan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui aspek ketenagakerjaan dengan cara perlindungan tenaga kerja. Kebijakan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

## **B. Kemiskinan**

### **1. Pengertian kemiskinan**

Kemiskinan pada umumnya merupakan permasalahan sosial bersifat global, artinya kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi dan menjadi perhatian khusus bagi banyak orang di dunia. Beberapa ahli mendefinisikan kemiskinan, seperti Piven, Cloward dan Swanson dalam bukunya Suharto menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan beberapa hal, yaitu:<sup>69</sup>

#### **a. Kekurangan materi**

Kekurangan materi menggambarkan kemiskinan yang ditandai dengan sulitnya mendapatkan barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

#### **b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai**

Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai berarti tidak tercapainya standar atau biasanya disebut dengan garis kemiskinan.

---

<sup>69</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 15.

c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial

Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial dalam permasalahan kemiskinan berarti munculnya kelangkaan terhadap fasilitas pelayanan sosial dan rendahnya aksestabilitas oleh lembaga-lembaga pelayanan sosial.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok guna mencapai tingkat kehidupan yang layak. Pengertian kemiskinan jika dilihat berdasarkan jenis-jenisnya:<sup>70</sup>

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah adanya kemiskinan yang timbul karena faktor ketidaklayakan pada kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam yang menunjukkan rendahnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

b. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah adanya kemiskinan yang timbul karena tidak adanya usaha dari seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki kualitas hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik, meskipun mau berusaha disitu terdapat orang lain yang membantu.

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah adanya kemiskinan yang timbul karena tatanan dari struktur sosial yang ada dan tatanan lembaga dalam masyarakat yang kurang begitu cocok.

---

<sup>70</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 9-10

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu diberikan perhatian untuk kemudian mendapat penanggulangan, karena:<sup>71</sup>

- a. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakberuntungan bagi kaum miskin, karena kaum miskin memiliki keterbatasan akses terhadap institusional dan politik.
- b. Kemiskinan dapat menjerumuskan orang miskin untuk bertindak kriminalitas.
- c. Bagi pembuat kebijaksanaan, kemiskinan merupakan salah satu gambaran gagalnya kebijaksanaan yang telah dibuat dan diterapkan pada masa lampau.

## 2. Penyebab kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>72</sup>

### a. Faktor individual

Faktor individu yang dapat mengakibatkan kemiskinan berkaitan dengan dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin.

### b. Faktor sosial

Faktor sosial yang dapat menyebabkan kemiskinan berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, seperti diskriminasi, kondisi sosial, kondisi ekonomi dalam suatu keluarga.

---

<sup>71</sup> Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 71.

<sup>72</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan . . .* hal. 17-18.

c. Faktor kultural

Faktor kultural yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah kondisi budaya yang menghubungkan mentalitas atau kebiasaan hidup dengan kemiskinan.

d. Faktor struktural

Faktor struktural adalah sistem atau struktur yang kurang begitu baik seperti tidak adanya keadilan, tidak adanya sensitif, tidak adanya akses sehingga dapat menyebabkan orang atau kelompok miskin

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup besar dan disebabkan oleh banyak faktor secara luas, berikut adalah penyebab dari kemiskinan:<sup>73</sup>

a. Globalisasi

Globalisasi dalam negara berkembang menjadi kalah saing dan menjadi tersingkirkan dalam pasar bebas yang diakibatkan oleh tergerusnya negara berkembang dari arus globalisasi. Globalisasi mengakibatkan adanya kecenderungan bagi kelompok-kelompok negara maju berperan aktif bagi negara-negara lain sehingga negara maju menjadi negara pemenang, sedangkan kelompok-kelompok negara berkembang lebih cenderung berperan pasif dan lebih cenderung untuk mengikuti arus globalisasi yang disebabkan oleh negara pemenang atau negara maju.

---

<sup>73</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan* . . . hal 12-13

b. Pola daerah pembangunan

Penerapan dari pola pembangunan yang kurang begitu memberikan efek bagi perekonomian dan cenderung lebih mengakibatkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti pola pembangunan pedesaan atau perkotaan. Pola pembangunan daerah menjadikan bentuk perekonomian hanya terpusat dalam satu daerah, sedangkan daerah yang lain tidak bahkan lebih cenderung mengakibatkan daerah yang lain menjadi tertinggal dan menyebabkan kemiskinan.

c. Kemiskinan sosial

Masalah sosial berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dimainkan oleh masyarakat akan menjadi terhambat dan akan menghambat arus dari perekonomian, sehingga keadaan sosial merupakan penyebab dari kemiskinan, karena dengan adanya kondisi sosial yang kurang begitu baik pada masyarakat maka akan menyebabkan kemiskinan.

d. Kemiskinan konsekuensial

Faktor eksternal yang terjadi dapat menyebabkan kemiskinan konsekuensial. Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah faktor yang tidak diakibatkan oleh manusia selaku pemeran utama dalam ekonomi dan faktor eksternal termasuk dalam faktor yang terjadinya secara alamiah. Jumlah penduduk yang tinggi dan bencana alam merupakan contoh dari faktor eksternal.

### 3. Konsep dan Pendekatan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan kemiskinan menurut Todaro dan Smith dalam bukunya Beik dan Arsyianti mencerminkan pada konsep kemiskinan absolut, yang berarti kemiskinan diukur berdasarkan atas dasar ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan dihitung berdasarkan ketentuan *monetary value* sebagai batasannya. Pendekatan kemiskinan selain absolut, terdapat pendekatan lainnya yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu ukuran kemiskinan yang didasarkan perbandingan antarkelompok.<sup>74</sup>

Definisi kemiskinan menurut Al-Ghazali dalam bukunya Huda adalah seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan disebut dengan kemiskinan. Seseorang yang disebut sebagai orang miskin adalah jika barang yang dibutuhkan tersedia dan barang yang dibutuhkan dapat dijangkau. Kemiskinan menurut Al-Ghazali dalam bukunya Huda dibagi menjadi.<sup>75</sup>

- a. Kemiskinan yang ada hubungannya dengan kebutuhan material
- b. Kemiskinan yang ada hubungannya dengan kebutuhan rohani

Kemiskinan dalam konsep kebutuhan minimal menurut perspektif Islam tidak sekedar berkaitan dengan aspek materiil, akan tetapi adanya

---

<sup>74</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rawalai Pers, 2016), hal. 69

<sup>75</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam . . .* hal. 23

keterkaitan dengan kebutuhan spiritual dan beribadah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Thaahaa ayat 118-119 dan Al-Qur'an Surat Al-Quraisy ayat 3-4 yang menjelaskan tentang kebutuhan pokok.<sup>76</sup> Al-Qur'an Surat Thaaha ayat 118-119 yaitu:<sup>77</sup>

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا

تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya:

*118. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, 119. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas dan matahari.*

Al-Qur'an Surat Al-Quraisy ayat 3-4 yaitu:<sup>78</sup>

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

<sup>76</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah . . .* hal. 73

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 320

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 602

Artinya:

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Al-Qur'an Surat Thaahaa ayat 118-119 dan Al-Qur'an Surat Al-Quraisy ayat 3-4 menjelaskan tentang kebutuhan pokok yaitu:<sup>79</sup>

1. Dapat melaksanakan ibadah;
2. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
3. Hilangnya rasa takut.

Kemiskinan menurut Ahmed dalam bukunya Huda mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan perampasan barang dan jasa, akan tetapi ada hubungannya dengan kurangnya kemiskinan dalam roh. Kemiskinan menurut Rehman dalam bukunya Huda berpendapat bahwa umat Islam dalam peningkatan kehidupan rohani dengan meningkatkan kehidupan material, sedangkan Chapra dalam bukunya Huda berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan karena dalam Islam terdapat adanya penekanan yang sama dalam urusan spiritual dan duniawi.<sup>80</sup>

Pandangan Islam tentang kemiskinan dapat membahayakan kelogisan berpikir, akhlak, keluarga, dan masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang seharusnya meminta perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang ada dalam kemiskinan. Kemiskinan yang semakin merajalela, maka akan

---

<sup>79</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah . . .* hal. 73

<sup>80</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam. . .* hal. 23

menyebabkan lupa kepada Allah SWT dan rasa sosialnya terhadap sesama.<sup>81</sup>

Untuk mengatasi kemiskinan menurut Al-Maududi dalam bukunya Nurul Huda, dkk, maka yang perlu diterapkan dan digunakan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Bekerja dan berusaha
- 2) Adanya larangan untuk tidak menumpuk harta
- 3) Zakat
- 4) Hukum waris
- 5) Gianimah
- 6) Hemat

### **C. Tenaga Kerja**

#### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan imbalan baik melalui anggota badan maupun pikiran. Tenaga kerja termasuk kedalam faktor produksi, karena tenaga kerja bertugas untuk mengolah kekayaan alam. Kekayaan yang terdapat di alam tidak terhitung nilainya, akan tetapi kekayaan akan menjadi tidak berguna jika tidak diolah oleh manusia dan kekayaan alam akan tersimpan jika tidak ada usaha manusia untuk mengolah kekayaan alam.<sup>83</sup> Tenaga kerja merupakan pekerja/karyawan yang kerja mempunyai rata-rata bekerja perhari.<sup>84</sup> Bekerja dilakukan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hal. 23

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 25

<sup>83</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 227

<sup>84</sup><https://jatim.bps.go.id/subject/9/industri.html#subjectViewTab1> (diakses pada Senin, 20-04-2020, pukul 20.35 WIB)

dengan cara melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan.<sup>85</sup>

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan bekerja sebagai kewajiban bagi orang-orang yang mampu dalam melakukan pekerjaan, serta Allah akan memberikan balasan kepada manusia atas apa yang telah dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>86</sup> Penekanan utama terhadap pekerjaan disebutkan dalam Al-Qur'an, serta Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan di bumi untuk bekerja keras untuk kehidupan masing-masing sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Balad ayat 4:<sup>87</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

Artinya:

*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*

Kata “kabad” mempunyai arti kesusahan, kesukaran, kepayahan, perjuangan, dan kesulitan yang disebabkan oleh kerja keras. Kata “kabad” menunjukkan bahwa manusia sebaiknya senantiasa berusaha menanggung dan melakukan segala kesukaran dan

<sup>85</sup><https://jatim.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjectViewTab1> (diakses pada Senin, 20-04-2020, pukul 20.41 WIB)

<sup>86</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* . . . hal. 227

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah* . . . hal. 594

kesusahan dalam perjuangan untuk mencapai kemajuan. Kemajuan yang dicapai harus dengan cara ketekunan dan bekerja keras.<sup>88</sup>

## **2. Keterkaitan Tenaga Kerja dengan Kesejahteraan**

Tenaga kerja merupakan semua penduduk yang termasuk dalam usia kerja, meliputi yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan semua penduduk yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain faktor modal dan faktor alam. Banyaknya angkatan kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan tenaga kerja mempunyai hubungan dengan produktivitas kerja. Kesejahteraan tenaga kerja baik, maka produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja juga akan semakin baik, karena pekerja dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya, sehingga pikiran dan tenaga kerjanya akan terfokus dalam pekerjaan.<sup>89</sup>

Seseorang yang bekerja dapat memberikan dampak kesejahteraan yang besar, oleh karena itu dapat menyebabkan semangat kerja. Karyawan menurut Robinson dan Segrott dalam buku Busro menjelaskan bahwa karyawan lebih memilih tempat kerja yang meyakinkan, karena tempat kerja yang meyakinkan akan dapat memberikan gaji yang tinggi. Bekerja memberikan kepercayaan diri,

---

<sup>88</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: . . .* hal. 228

<sup>89</sup> Kardiman, dkk, *Ekonomi – Dunia Keseharian Kita*, (Jakarta: Yudhistira, 2006), hal. 63

perubahan hidup, keadaan finansial, dan lain-lain menjadi faktor dalam rasa kesejahteraan.<sup>90</sup>

Kesejahteraan pekerja atau buruh merupakan hak yang dimiliki oleh buruh, karena buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dapat hidup dengan layak. Pekerja beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial. Perlindungan sosial menurut Fronner dalam buku Busro terdiri dari:<sup>91</sup>

a. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis merupakan perlindungan yang diberikan kepada pekerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup, termasuk apabila pekerja tidak mampu untuk bekerja di luar kemampuannya.

b. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja seperti jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi.

c. Perlindungan teknis

Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja seperti keselamatan kerja dan keamanan tenaga kerja.

---

<sup>90</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 115

<sup>91</sup>*Ibid.*, hal. 116

### 3. Jenis Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria yang ada:<sup>92</sup>

a. Berdasarkan penduduknya

1) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah semua penduduk yang dianggap mampu bekerja dan sanggup bekerja apabila tidak ada permintaan bekerja.

2) Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah semua penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak sanggup bekerja meskipun ada permintaan untuk bekerja.

b. Berdasarkan kualitasnya:

1) Angkatan kerja

Angkatan kerja merupakan orang yang memiliki pekerjaan yang terdiri dari orang yang sedang bekerja atau orang yang sedang berhenti bekerja untuk sementara waktu dikarenakan beberapa alasan.

2) Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, lanjut usia,

---

<sup>92</sup> Choms Gary Ganda Tua Sibarani, dkk, *Dasar-Dasar Keewirausahaan*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), Hal. 7-9

cacat, dan orang yang tidak sedang melakukan kegiatan apapun yang dapat digolongkan kedalam pekerjaan.

c. Berdasarkan kualitasnya

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu dengan cara menempuh pendidikan formal dan nonformal.

2) Tenaga kerja tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian atau keterampilan dengan adanya pengalaman kerja melalui pelatihan secara berulang-ulang untuk menguasai suatu pekerjaan.

## **D. Tingkat Pengangguran Terbuka**

### **1. Pengangguran Terbuka dan Konsepnya**

Angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan disebabkan oleh angkatan kerja yang jumlahnya semakin bertambah akan tetapi tidak diikuti dengan lowongan pekerjaan yang semakin bertambah, maka akan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menganggur baik secara paruh waktu maupun penuh waktu yang dikarenakan tidak adanya kesempatan kerja. Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh merosotnya perekonomian yang diikuti dengan pengurangan tenaga kerja yang kemudian produksi di berbagai sektor akan menurun.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ali Ibrahim Hisyam, *Ekonomi Makro* . . . hal. 21.

Kondisi seseorang yang tidak bekerja tetapi ingin bekerja dan masih berusaha untuk mendapat pekerjaan disebut dengan pengangguran terbuka. Tidak tersedianya lowongan dan kesempatan kerja yang cocok dengan pendidikan dari pencari kerja sehingga menyebabkan ketidakmauan untuk bekerja merupakan penyebab dari pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dihitung berdasarkan jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase.<sup>94</sup>

Pengangguran terbuka dalam masyarakat terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan.
- b. Tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi masih menyiapkan untuk membangun usaha.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan, karena mempunyai pemikiran bahwa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.
- d. Belum bekerja padahal sudah menyiapkan pekerjaan.

## **2. Pengertian Pengangguran**

Pengangguran atau yang biasa disebut dengan orang yang menganggur adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Kelompok orang yang

---

<sup>94</sup><https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> (diakses pada hari Senin, 21-04-2020, pukul 21.55 WIB).

<sup>95</sup>*Ibid.*,

menganggur adalah kelompok orang diluar usia sekolah biasanya berumur 16 tahun keatas yang tidak mempunyai pekerjaan.<sup>96</sup> Penganggur atas dasar kemauannya dapat dibedakan menjadi penganggur terpaksa dan penganggur sukarela.<sup>97</sup>

- a. Penganggur terpaksa adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan meskipun sudah mencari pekerjaan dan mau menerima apapun pekerjaannya sekalipun upah yang diterimanya lebih rendah pada umumnya.
- b. Penganggur sukarela adalah orang yang memilih untuk meganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai atau upah yang diterimanya lebih rendah pada umumnya.

Bekerja merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, karena dengan bekerja maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Islam mengajarkan manusia untuk tidak lepas dari bekerja, artinya dalam Islam sudah disebutkan untuk tidak menganggur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105:<sup>98</sup>

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

<sup>96</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi 2)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 264.

<sup>97</sup> T. Gilarso, *Dunia Ekonomi Kita – 2B: Pendapatan Nasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 53.

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 203.

Artinya:

*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan keharusan seseorang untuk bekerja dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran di dunia dan akhirat, dengan demikian tidak ada waktu untuk bersantai-santai tanpa ada suatu pekerjaan. Seseorang yang sibuk dengan bekerja berarti tidak ada waktu untuk menganggur, karena menganggur hanya akan membuang-buang waktu saja dan tidak akan mendapatkan imbalan, sehingga tidak ada pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **3. Jenis Pengangguran**

Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, jika dilihat berdasarkan angkatan kerja, yaitu:<sup>99</sup>

#### **a. Pengangguran friksional**

Kategori yang termasuk dalam pengangguran friksional adalah pekerja sementara yang disebut dengan pendatang yang sedang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya karena harus berpindah tempat yang baru, sehingga di tempat baru mendapat pekerjaan baru agar apa yang dikerjakan bisa menjadi lebih produktif.

---

<sup>99</sup> Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal. 130.

b. Pengangguran struktural

Keterampilan yang tidak dimiliki oleh seseorang karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga terjadinya selisih antara pekerjaan dengan pengetahuan yang dimiliki, maka dapat menyebabkan menganggur disebut dengan pengangguran struktural.

c. Pengangguran siklus

Pengangguran yang disebabkan oleh depresi dan resesi ekonomi yang diiringi dengan merosotnya dunia bisnis, sehingga perusahaan cenderung untuk lebih mengurangi pekerja, akan tetapi jika ekonomi sudah kembali pulih maka akan banyak yang mencari pekerjaan disebut dengan pengangguran siklus.

d. Pengangguran musiman

Pengangguran yang disebabkan oleh waktu karena cara rekrutmennya yang dirubah disebut dengan pengangguran musiman.

#### **4. Perhitungan Tingkat Pengangguran**

Penduduk yang mendiami suatu wilayah apabila dikaitkan dengan pekerjaan maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok:<sup>100</sup>

a. Bekerja

Kelompok bekerja adalah orang yang mendapat bayaran dan bekerja dalam bidang apapun, termasuk orang-orang yang bekerja akan tetapi tidak masuk kerja dikarenakan cuti, sakit, atau pemogokan.

---

<sup>100</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 1988), hal. 270-271

b. Menganggur

Kelompok menganggur adalah orang yang sedang tidak bekerja, akan tetapi masih berusaha untuk mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja dari perusahaan tempat bekerja. Kelompok menganggur tidak cukup dengan berpikir tentang pekerjaan atau hanya merenungi pekerjaan, akan tetapi haruslah berusaha untuk mendapat pekerjaan dengan pelamar. Kelompok pekerja maupun penganggur termasuk dalam angkatan kerja.

c. Bukan angkatan kerja

Kelompok bukan angkatan kerja adalah seseorang yang tidak mampu untuk bekerja dan tidak akan mencari pekerjaan karena disebabkan oleh banyak hal, seperti: sakit parah, masih sekolah, dan pensiun.

Perhitungan tingkat pengangguran merupakan jumlah penganggur dibagi dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Perhitungan tingkat pengangguran didasarkan pada tiga kelompok yaitu:<sup>101</sup>

- a. Pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan
- b. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang mencari pekerjaan
- c. Bukan angkatan kerja adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan.

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, hal. 271-272.

## E. Upah Minimum

### 1. Pengertian Upah

Upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Pengertian upah dalam teori ekonomi terdapat 2 perbedaan, yaitu:<sup>102</sup>

#### a. Upah uang

Upah uang adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh pekerja baik tenaga mental maupun tenaga fisik yang digunakan dalam proses produksi.

#### b. Upah riil

Upah riil adalah tingkat upah yang diterima oleh pekerja yang diukur berdasarkan kemampuan upah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan guna mencukupi kebutuhan pekerja.

Pengertian upah berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 351.

<sup>103</sup> Asri Wijaya, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 102.

Bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13. Tahun 2003, terdiri atas:<sup>104</sup>

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

## 2. Pengertian Upah Minimum

Upah terendah yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan standar hidup minimum di daerah yang ditempati pekerja dan didalamnya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap disebut dengan upah minimum. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berguna untuk menjadi acuan jenis upah yang lain seperti upah borongan dan upah harian dimana upah-upah tersebut diberikan kepada pekerja tidak boleh dibawah dari upah minimum yang telah ditetapkan.<sup>105</sup> Sedangkan upah minimum yang ditetapkan dan berlaku di masing-masing Kabupaten atau Kota disebut dengan upah minimum kabupaten atau kota.

Upah minimum ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja agar bisa hidup layak sesuai dengan

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, hal. 108-109

<sup>105</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas* . . . hal. 4.

standar minimum daerah yang ditinggalinya. Tujuan lain dari ditetapkannya upah minimum yaitu untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agar tidak menggaji pekerjanya dengan semena-mena. Perbedaan upah minimum yang telah ditetapkan di masing-masing daerah didasari oleh:<sup>106</sup>

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM);
- b. Indeks harga konsumen (IHK);
- c. Kelangsungan dan perkembangan usaha;
- d. Upah yang diterapkan antar daerah dan di daerah tertentu;
- e. Pendapatan perkapita;
- f. Perkembangan perekonomian;
- g. Pasar kerja;

### 3. Dasar Penetapan Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan dengan acuan dan pertimbangan yang mendasari penetapan upah minimum, yaitu:<sup>107</sup>

- a. Sebagai pelindung agar tidak terjadi kemerosotan nilai upah dibawah standar hidup minimum.
- b. Perwujudan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), UUD 1945, Pancasila dalam hal pelaksanaannya secara nyata.
- c. Menjangkau seluruh kalangan masyarakat utamanya yang memiliki pendapatan yang rendah dengan cara memberikan peluang keseluruhan kalangan masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
- d. Untuk menyamakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal. 57-58

<sup>107</sup> Yussy Santosa dan Ronni R. Masman, *A Practical Guidance to Executive Compensation Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hal. 20.

- e. Memberikan hak-hak pekerja sebagai salah satu upaya penegakan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
- f. Pertimbangan ekonomi melalui pendapatan perkapita.

#### 4. Penentuan Upah

Permasalahan upah sangat penting karena dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat secara keseluruhan. Pekerja yang tidak mendapatkan upah yang memadai maka tidak sekedar mempunyai pengaruh terhadap nafkahnya saja, melainkan dapat berpengaruh terhadap daya beli. Daya beli yang tidak cukup maka akan berpengaruh dengan industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi para pekerja. Upah menurut *subsistency theory* lebih mengarah kepada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum saja.<sup>108</sup>

Islam menjelaskan terkait dengan solusi dalam permasalahan upah yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta perlindungan bagi pekerja maupun majikan. Penetapan upah menurut Islam harus didasarkan pada kelayakan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ketentuan tingkat upah minimum dalam masyarakat Islam didasarkan pada kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Pekerja haruslah dibayar dengan upah yang cukup sehingga pekerja dapat membayar makanan, pakaian, dan perumahan, serta dapat mencukupi kebutuhan hidup bagi pekerja sendiri dan keluarganya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System) Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 197-198

<sup>109</sup>*Ibid.*, hal. 198-199

Upah merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada para pekerja atas apa yang telah dikerjakan. Upah merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja sesuai dengan yang dikerjakan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:<sup>110</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

*Barang siapa mengajarkan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 mengandung arti balasan, yaitu berupa upah. Seseorang jika melakukan pekerjaan maka berhak untuk mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Balasan yang diterima haruslah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, karena balasan merupakan hak semua orang yang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah dilakukan sehingga adil dalam menerima balasan.

Imbalan atau upah sesuai dengan yang dikerjakan memiliki prinsip bahwa pemberian upah harus meliputi dua hal, yaitu mencukupi dan adil. Mencukupi berarti upah yang diberikan haruslah sesuai dengan standar

<sup>110</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 278

minimum hidup dan upah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Adil berarti upah yang diberikan haruslah adil sesuai dengan kapasitas yang dikerjakan agar upah yang diberikan kepada pekerja bisa merata sehingga tidak terjadi ketimpangan.

## **F. Indeks Pembangunan Manusia**

### **1. Konsep Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia merupakan proses dalam memperbanyak pilihan (*a process of enlarging people's choice*). Penduduk sebagai pusat perhatian dalam pembangunan manusia dalam menentukan tujuan dan pencapaian analisis didukung oleh 4 pilar, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Produktifitas
- b. Pemerataan
- c. Kestinambungan
- d. Pemberdayaan

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang didalamnya terdapat 3 aspek penting dalam kurun waktu tertentu, diantaranya adalah kesehatan yang berkaitan dengan kualitas fisik, pendidikan yang berkaitan dengan intelektualitas, dan daya beli yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Indeks pembangunan manusia bertujuan untuk terwujudnya beberapa hal seperti kebutuhan dasar dapat terpenuhi, meningkatnya kualitas hidup, dan tercapainya kesejahteraan rakyat.<sup>112</sup> Indeks pembangunan manusia sesuai dengan tujuannya yaitu

---

<sup>111</sup> Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf, *Perekonomian Indonesia Edisi . . .* hal. 293

<sup>112</sup>*Ibid.*, hal. 293

tercapainya kesejahteraan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:<sup>113</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa apabila manusia telah selesai melakukan shalat, maka manusia disuruh untuk mencari karunia Allah SWT sebanyak-banyaknya. Manusia dilarang malas dalam mencari rezeki, karena rezeki tidak datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia. Manusia dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan potensi akal yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena akal merupakan modal untuk meningkatkan produktivitas kerja, sehingga manusia disuruh untuk mengasah terus potensi yang ada dalam diri manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan agar manusia menjadi lebih berkualitas.

---

<sup>113</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 554

## 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan IPM menurut *United Nations Development* (UNDP)

didasarkan pada 3 komponen yaitu:<sup>114</sup>

- a. Tingkat kesehatan diukur dengan umur harapan hidup
- b. Tingkat pendidikan diukur dari presentase melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama sekolah
- c. Daya beli (*purchasing power*) yang diukur dari pengeluaran (konsumsi) perkapita masyarakat.

Indeks pembangunan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia terdapat beberapa komponen, yaitu:<sup>115</sup>

- a. Usia hidup

Usia hidup diukur dengan cara menggunakan angka harapan hidup yang dihitung dengan metode tidak langsung didasarkan pada rata-rata anak lahir yang hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

- b. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dengan cara menggunakan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Angka melek huruf didasarkan pada kemampuan baca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan kelas atau tingkat yang sedang atau pernah dijalani dan tamatan jenjang pendidikan tertinggi.

- c. Standar hidup layak

Standar hidup layak diukur dengan cara indikator rata-rata konsumsi riil yang telah dikeluarkan.

---

<sup>114</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah . . .* hal. 166

<sup>115</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah . . .* hal. 159

Badan pusat statistik dalam mengukur IPM menggunakan empat komponen, yaitu:<sup>116</sup>

a. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata banyak tahun selama hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang.

b. Angka harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang bisa diharapkan dan dinyatakan dalam tahun oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.

c. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang ditempuh dalam menjalani pendidikan formal oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

d. Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan

Pengeluaran riil perkapitan yang disesuaikan merupakan tolok ukur dalam mengukur kelayakan standar hidup.

### 3. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia untuk mengukur seberapa besar capainnya pada suatu wilayah menggunakan tiga dimensi untuk mengukur suatu capaian dalam pembangunan manusia yaitu, lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks tersebut dihitung

---

<sup>116</sup><https://jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>  
(diakses pada Senin, 27-04-2010, pukul 20.54)

berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.<sup>117</sup>

Perubahan metodologi perhitungan IPM terjadi pada tahun 2014, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perubahan metodologi perhitungan IPM, yaitu:<sup>118</sup>

- a. Angka melek huruf sudah tidak tepat dalam mengukur pendidikan, karena angka melek huruf tidak menunjukkan kualitas dari pendidikan dan di beberapa daerah angka melek huruf sudah tinggi, sehingga di beberapa daerah tidak menunjukkan tingkat pendidikan.
- b. Pendapatan masyarakat di suatu wilayah tidak digambarkan oleh produk domestik bruto per kapita.
- c. Perhitungan IPM dengan menggunakan rumus rata-rata aritmatik tidak menunjukkan tingginya capaian dari dimensi dapat menutupi rendahnya capaian di suatu dimensi lain.

Alasan dari perubahan metode perhitungan IPM, maka terjadi perubahan metode dan indikator dalam perhitungan IPM, yaitu:<sup>119</sup>

1. Metode lama dengan menggunakan indikator angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah.
2. Metode lama dengan menggunakan produk domestik bruto per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita.

---

hal. 38 <sup>117</sup> Henry J.D Tambotot dan Allen A. Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan . . .*

<sup>118</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah . . .* hal. 168

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 168

3. Metode lama dengan menggunakan rata-rata aritmatik pada metode agregasi diganti dengan rata-rata geometrik.

Perubahan metode lama diganti metode baru, maka terdapat beberapa keunggulan dalam metode IPM yang baru, yaitu:<sup>120</sup>

1. Indikator yang digunakan dalam IPM menjadi lebih tepat dan dapat dibedakan.
2. Terdapat gambaran yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan perubahan yang terjadi dengan dimasukkannya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. PNB dapat menunjukkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah jika dibandingkan dengan PDB.
4. Capaian suatu dimensi tidak dapat menutupi capaian suatu dimensi lainnya karena dalam IPM digunakan rata-rata geometrik, artinya pembangunan manusia dapat terwujud dengan baik, dikarenakan dari ketiga dimensi yang sama pentingnya mendapatkan perhatian yang sama besar.

## **G. Kepadatan Penduduk**

### **1. Kependudukan**

Kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan permasalahan kependudukan yang terdiri dari distribusi, struktur, dan ukuran penduduk, serta perubahan jumlah penduduk yang dilihat melalui migrasi, kelahiran, perkawinan, kematian, dan mobilitas sosial.

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hal. 168

Pembangunan dengan mengedepankan aspek kependudukan memberikan pengertian yaitu:<sup>121</sup>

- a. Pembangunan dengan mengedepankan aspek kependudukan merupakan pembangunan dengan adanya penyesuaian antara kondisi penduduk dengan potensi yang ada.
- b. Pembangunan dengan mengedepankan kependudukan merupakan pembangunan melalui sumber daya manusia, artinya pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daripada pembangunan pada infrastruktur yang ada.

Penduduk mempunyai peran yang strategis terhadap pembangunan, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Objek dari pembangunan adalah penduduk, sehingga penduduk menjadi pusat dari kebijakan yang dilakukan pemerintah. Keberhasilan dari pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dilihat dari kualitas fisik dan non fisik.
- b. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh keadaan penduduk. Penduduk dengan jumlah yang besar, apabila diikuti dengan kualitas penduduk yang tinggi akan mampu mendorong pembangunan, akan tetapi jika jumlah penduduk tinggi dengan kualitas penduduk yang rendah maka penduduk akan menjadi beban bagi pembangunan.

---

<sup>121</sup> Achmad Faqih, *Kependudukan – Teori, Faktor, dan masalah*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2010), hal. 1-3

<sup>122</sup>*Ibid.*, hal. 5

- c. Perubahan penduduk akan mempunyai pengaruh dalam jangka panjang, sehingga perubahan penduduk sering diabaikan dalam pembangunan.
- d. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan kependudukan.

Kependudukan dalam Islam merupakan masalah yang diperhatikan, karena menyangkut tugas manusia di bumi sebagai khalifah atau pemimpin. Masalah kependudukan dan kehidupan manusia telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya mengenai khalifah di bumi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30:<sup>123</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُۢنٌۭ نُّسِیۡحٌۭ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya:

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia di sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi berperan untuk mengolah,

<sup>123</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 6

memakmurkan, atau memberdayakan bumi.<sup>124</sup> Peran manusia di bumi terdapat kaitan antara manusia dengan sumber daya dukungnya, sehingga antara manusia dengan sumber daya dukungnya menjadi seimbang, kemudian tidak terjadi kerusakan yang disebabkan oleh manusia dan apabila ada keseimbangan antara manusia dengan sumber daya dukunya maka terciptalah kesejahteraan.

Masalah kependudukan dengan potensi daya dukungnya juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Lail ayat 1-4 tentang usaha manusia di bumi berbeda-beda, berikut Al-Qur'an Surat Al-Lail ayat 1-4:<sup>125</sup>

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

Artinya:

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), 2. Demi siang apabila terang benderang, 3. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan,
4. Sungguh, usahamu memang beraneka macam.

Al-Qur'an Surat Al-Lail menjelaskan manusia sebagai makhluk ekonomis berusaha untuk mempertahankan hidup. Manusia melakukan usaha dalam mempertahankan hidup beraneka macam, seperti nelayan,

<sup>124</sup> Ruslan, *Ayat-Ayat Ekonomi* . . . hal. 2

<sup>125</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah* . . . hal. 595

bercocok tanam, berjualan, bekerja di pabrik, bertukang, guru, dan lain-lain. Manusia diperbolehkan melakukan usaha berbagai macam usaha asalkan halal.<sup>126</sup> Usaha yang dilakukan oleh manusia tergantung dengan potensi yang ada disekitarnya, ini menjelaskan bahwa daerah yang memiliki potensi sumber daya dukung yang banyak akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga daerah dengan sumber daya dukung banyak dan sumber daya dukung yang banyak maka akan padat penduduknya.

## 2. Konsep Kepadatan Penduduk

Penduduk Indonesia adalah seluruh orang yang bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah teritorial Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih dan/atau yang kurang dari 6 bulan akan tetapi bertujuan untuk menetap.<sup>127</sup> Kepadatan penduduk adalah rasio jumlah penduduk per kilometer persegi.<sup>128</sup>

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempunyai akibat kepada masalah ekonomi. Kepadatan penduduk dalam masalah ekonomi sebenarnya menjadi modal positif, karea jumlah penduduk yang banyak dalam negara karena suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang banyak dalam membangun negaranya di bidang ekonomi. Penduduk yang tinggi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif bagi suatu negara, karena banyaknya penduduk apalagi didominasi dengan banyaknya penduduk yang non produktif menyebabkan beban bagi suatu

---

<sup>126</sup> Ruslan, *Ayat-Ayat Ekonomi* . . . hal. 4

<sup>127</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam* . . . hal. 36

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 36

negara. Penduduk yang non produktif lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang produktif akan menyebabkan beban bagi penduduk yang produktif. Kepadatan penduduk yang tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan akan menyebabkan permasalahan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan.

### 3. Faktor dan Penanggulangan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu:<sup>129</sup>

#### a. Faktor iklim dan topografi

Kenyamanan iklim dan landainya topografi dapat menyebabkan terpusatnya penduduk sehingga suatu daerah menjadi padat penduduk.

#### b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk adalah lapangan pekerjaan yang tersedia dan sumber daya alam yang ada. Daerah yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi maka akan dipadati penduduk yang bertani, daerah pertambangan akan padat penduduk dikarenakan kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan banyak orang, dan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor industri akan menyebabkan kepadatan penduduk. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk biasanya adalah daerah perkotaan atau daerah yang sedang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi kota, karena banyaknya penduduk yang

---

<sup>129</sup> Idianto Mu'in MK, *Pengetahuan Sosial – Geografi 2*, (Bekasi: Grasindo, 2004), hal.

berpindah ke perkotaan dan penduduk tidak banyak yang berpindah ke luar kota.

c. Faktor sosial budaya

Faktor sosial budaya meliputi kesempatan dalam bidang pendidikan dan adanya masyarakat yang terbuka sehingga daerah yang aman akan menjadi pemukiman padat penduduk.

Kepadatan penduduk akan menyebabkan tidak tersedianya sumber daya alam seperti kebutuhan makanan, perumahan, dan fasilitas masyarakat, sehingga daerah yang memiliki padat penduduk dapat menyebabkan terkurasnya sumber daya alam yang tersedia dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan dampak yang kurang menguntungkan, sehingga perlunya pengurangan kepadatan penduduk, akan tetapi tanpa melanggar hak asasi manusia melalui program-program sebagai berikut:<sup>130</sup>

a. Transmigrasi (perpindahan penduduk)

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke tempat lain yang penduduknya jarang yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri maupun dibantu oleh pemerintah.

b. Pemerataan lapangan kerja

Pemerataan lapangan kerja akan mendorong perpindahan penduduk sedikit demi sedikit menuju daerah lain yang mempunyai kegiatan

---

<sup>130</sup>*Ibid.*, hal. 94-95

ekonomi terpusat, seperti pemerataan dalam pengembangan perikanan, pertanian, pertambangan, dan industri.

c. Kendali atas kelahiran

Pengendalian melalui jumlah kelahiran penduduk untuk mengendalikan jumlah penduduk, seperti pembatasan usia perkawinan dan adanya program keluarga berencana.

## H. Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran dari perkembangan perekonomian melalui suatu ukuran kuantitatif dalam tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>131</sup> Pertumbuhan ekonomi dalam pengertiannya terdapat tiga unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:<sup>132</sup>

- a. Peningkatan persediaan barang dari waktu ke waktu dapat dilihat sebagai ciri dari adanya pertumbuhan ekonomi.
- b. Kemampuan untuk meningkatkan persediaan barang naik dari segi jumlah maupun jenisnya yang disebabkan oleh majunya teknologi dalam aktivitas ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.
- c. Pemanfaatan inovasi yang didapatkan dari ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi secara tepat, efisien, dan luas serta diimbangi oleh kesesuaian antara ideologi yang terdapat di suatu daerah dan juga struktur kelembagaan dari daerah-daerah tersebut.

---

<sup>131</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses . . .* hal. 9

<sup>132</sup> Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarsono, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 31.

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

### a. Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik diperkenalkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang dirasa terbaik untuk dilakukan maka masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Smith berpendapat bahwa efisiensi dalam perekonomian ditimbulkan akibat ekonomi pasar bebas dengan ketentuan perekonomian mengarah pada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi pada titik stationer. Pemerintah tidak perlu untuk ikut campur tangan secara langsung, melainkan pemerintah bertugas untuk menyediakan fasilitas dan menciptakan perekonomian untuk mendorong pihak swasta agar lebih optimal dalam perekonomian.<sup>133</sup>

Teori ekonomi klasik berdasarkan pandangan klasik dikoreksi oleh John Keynes dalam bukunya Tarigan mengatakan bahwa pemerintah dapat ikut andil dalam menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan secara langsung guna terciptanya kestabilan pertumbuhan. Pandangan Smith dan pandangan Keynes sebenarnya sama-sama menekankan pada mekanisme pasar, yang membedakan adalah ikut campur tangan dari pemerintah.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori . . .* hal. 47

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 48

b. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional

Teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan pandangan Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar dalam bukunya *Tarigan* menyimpulkan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang yang memuaskan (adanya penyerapan oleh pasar terhadap kenaikan produksi secara keseluruhan) dapat tercapai jika memenuhi syarat keseimbangan yaitu tingkat pertumbuhan output sama dengan tingkat pertumbuhan modal sama dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Kesimpulan teori pertumbuhan dalam jangka panjang oleh Harrod-Domar didasarkan pada:<sup>135</sup>

1. Perekonomian yang bersifat tertutup
2. Hasrat menabung adalah konstan
3. Adanya koefisien yang tetap pada proses produksi
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menyebutkan bahwa mekanisme pasar terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah haruslah merencanakan besarnya investasi untuk menciptakan keseimbangan sisi permintaan dan sisi penawaran barang. Teori pertumbuhan Harrod-Domar perlu perhatian khusus bagi wilayah terpencil dan terbelakang, karena dalam kondisi yang terpencil dan

---

<sup>135</sup>*Ibid.*, hal. 49

terbelakang biasanya sulit melakukan konversi antara tenaga kerja dan barang modal yang disebabkan oleh kelangkaan dari barang modal.<sup>136</sup>

c. Teori pertumbuhan neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik diperkenalkan oleh Robert M. Solow dan T.W Swan. Teori pertumbuhan oleh Solow-Swan didalamnya terdapat unsur akumulasi kapital, pertumbuhan penduduk, besarnya output yang saling berinteraksi, dan kemajuan teknologi. Teori Solow-Swan melihat bahwa pemerintah tidak perlu terlalu ikut campur tangan dalam pasar, karena untuk mencipatakan keseimbangan dapat disebabkan oleh banyak hal berkaitan dengan mekanisme pasar, akan tetapi pemerintah sekedar ikut campur tangan dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.<sup>137</sup>

Teori neo-klasik menyebutkan bahwa sebaiknya kondisi perekonomian haruslah diarahkan ke pasar persaingan sempurna, karena dengan pasar persaingan sempurna maka perekonomian akan tumbuh secara maksimal. Kebijakan yang ditempuh dalam teori neo-klasik mengarah pada terjaminnya kelancaran dari modal, arus barang, penyebaran informasi pasar, dan tenaga kerja serta harus terciptanya hubungan antara prasarana dan perhubungan yang baik. Teori neo-klasik perlunya perhatian khusus terhadap faktor kemajuan

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, hal. 50-52

<sup>137</sup>*Ibid.*, hal. 52

teknik, yang dapat ditempuh dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia.<sup>138</sup>

d. Teori pertumbuhan ekonomi jalur cepat yang disinergikan

Teori pertumbuhan ekonomi jalur cepat yang disinergikan merupakan teori yang diperkenalkan Samuelson. Teori yang dipekenalkan oleh Samuelson menjelaskan bahwa seluruh wilayah atau negara diperlukan untuk mempertimbangkan komoditi atau sektor apa yang kiranya memiliki potensi besar dan dapat dengan cepat untuk dikembangkan, dengan alasan karena potensi alam maupun karena terdapatnya *competitive advantage* dalam sektor untuk dikembangkan.<sup>139</sup>

Teori pertumbuhan ekonomi jalur cepat berarti adanya kebutuhan modal dalam sektor yang sama maka mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dari sebelumnya, dengan waktu yang cenderung singkat dapat melakukan produksi, dan dapat memberikan sumbangan volume untuk perekonomian yang cukup besar. Tujuan dari permasalahan yang ada dalam teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan adalah untuk menjamin pasar maka produk yang diproduksi haruslah menembus dan mampu bersaing dengan pasar luar negeri. perkembangan sektor dalam pasar akan ikut mendorong sektor lain untuk berkembang sehingga menimbulkan tumbuhnya perekonomian secara keseluruhan.

---

<sup>138</sup>*Ibid.*, hal. 54.

<sup>139</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional* . . . hal. 54-55.

Pandangan dari beberapa ahli seperti Schumpeter mengatakan bahwa jiwa usaha dalam masyarakat dapat menentukan kemajuan ekonomi. Jiwa usaha berarti seseorang yang memiliki usaha berani untuk mengambil resiko dan membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah dirintis serta mampu untuk melihat peluang yang ada.<sup>140</sup> Pembukaan usaha baru dan perluasannya berarti menyediakan tambahan lapangan kerja sehingga mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang lebih setiap tahunnya.

Instabilitas keamanan dapat muncul karena disebabkan oleh adanya angkatan kerja yang tidak tertampung sehingga investor tidak ingin menanamkan investasinya dan perekonomian akan menjadi terhenti. Perekonomian berhentiakan menyebabkan banyaknya pencari kerja yang tidak dapat ditampung sehingga akan menimbulkan keadaan semakin parahnya instabilitas keamanan. Instabilitas keamanan ditandai dengan jaminan keamaan untuk berusaha yang sudah tidak ada sehingga investor yang sudah ada pun akan merelokasi usahanya, sehingga terjadinya depresi ekonomi dan turunnya kemakmuran.

e. Teori basis ekspor Richardson

Teori basis ekspor berasumsikan bahwa ekspor merupakan satu-satunya unsur independen dalam pengeluaran yang berarti bahwa unsur pengeluaran secara keseluruhan terikat terhadap pendapatan.

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, hal. 55

Ekspor adalah unsur yang meningkat secara bebas, karena sektor lain dapat meningkat jika terjadinya peningkatan pendapatan secara keseluruhan. Asumsi yang kedua dari teori basis ekspor adalah fungsi impor dan fungsi pengeluaran bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan.<sup>141</sup>

f. Model pertumbuhan interregional (perluasan dari teori basis)

Model pertumbuhan interregional merupakan perkembangan dari teori basis ekspor. Asumsi dalam model pertumbuhan interregional adalah terdapatnya unsur eksogen selain ekspor, yaitu pengeluaran pemerintah dan investasi. Model pertumbuhan interregional menyebutkan bahwa perubahan pendapatan regional tidak berasal dari ekspor saja, melainkan juga sumber lain.<sup>142</sup>

### 3. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian dalam kehidupannya dan dalam perkembangannya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang maju dan modern. Ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi, yaitu:<sup>143</sup>

a. Produk per kapita dan pertumbuhan penduduk

Cepatnya pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan kenaikan produk per kapita merupakan salah satu ciri pertumbuhan ekonomi yang modern.

b. Peningkatan produktivitas

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, hal. 56.

<sup>142</sup>*Ibid.*, hal. 56

<sup>143</sup>Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarsono, *Ekonomi Pembangunan . . .* hal. 32

Masuknya faktor ekonomi seperti modal dan tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai produktivitas yang semakin baik serta adanya perbaikan input dari segi kualitasnya yang dapat menyebabkan ketepatan dan kecepatan produktivitas tiap inputnya baik dari segi jumlah, kualitas, dan jenisnya dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dari berbagai bidang produktivitas yang dijalankan yang ditandai dengan peningkatan produk perkapita merupakan salah satu ciri pertumbuhan ekonomi.

c. Perubahan struktural

Perubahan struktural kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan atau peralihan yang terjadi secara terstruktur yang meliputi peralihan dari bidang yang satu ke bidang yang lain seperti dari industri ke jasa, yang bertujuan untuk menghasilkan unit produktif dengan harapan dapat menghasilkan produktivitas ke dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya.

d. Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi merupakan salah satu ciri pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya urbanisasi diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik, sehingga di tempat yang baru dapat meningkatkan produktivitas yang semakin tinggi. Urbanisasi menjadi ciri pertumbuhan ekonomi, karena akan menyebabkan tambahan pekerja sehingga meningkatkan output produksi.

e. Ekspansi negara maju

Perbedaan sejarah dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu negara dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki pengetahuan, sejarah, dan teknologi yang lebih baik dan maju maka pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut akan lebih cepat jika dibandingkan dengan negara yang lemah akan pengetahuan dan teknologi. Perbedaan negara kaitannya dengan pengetahuan, sejarah dan teknologi biasanya terjadi pada negara maju dan negara berkembang, negara maju cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik jika dibandingkan dengan negara berkembang.

f. Arus barang modal dan orang antar bangsa

Kelancaran dari sistem transaksi yang ditandai dengan mudahnya transportasi memberikan efek bagi kelancaran orang untuk bertransaksi, arus barang, dan modal. Arus barang modal dan orang antar bangsa yang semakin lancar maka dapat menyebabkan perekonomian menuju kearah yang lebih baik.

#### **4. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan istilah untuk menerangkan dan digunakan sebagai ukuran untuk mengukur prestasi dalam perkembangan suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian dicirikan dengan perkembangan fiskal barang dan jasa yang diproduksi, seperti meningkatnya jumlah barang industri, meningkatnya sektor jasa,

meningkatnya infrastruktur, dan meningkatnya produksi barang dan modal.<sup>144</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya peningkatan volume dan jasa, akan tetapi berkaitan dengan normalitas dan akhlak serta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari tercapainya materi, melainkan dilihat dari aspek perbaikan kehidupan, agama, sosial, dan kemasyarakatan.<sup>145</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus beriringan dengan pemerataan. Islam menekankan bahwa harus terjadinya kesimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.<sup>146</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

*Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara*

<sup>144</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* . . . hal. 423

<sup>145</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* . . . hal.

<sup>146</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah* . . . hal. 546

*orang-orang kaya saja di antara kamu. Apayang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Pertumbuhan dan pemerataan dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya pertumbuhan bukanlah tujuan utama, kecuali apabila diikuti dengan pemerataan.<sup>147</sup> Sistem ekonomi Islam menyebutkan bahwa modal merupakan bagian dari sistem ekonomi. Pertumbuhan dan modal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan dan tujuan dari adanya modal yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam adalah adanya pembayaran dari faktor produksi yang sesuai dengan kontribusinya dalam peroduksi barang dan jasa yang dihasilkan serta harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan.<sup>148</sup>

## **5. Faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>149</sup>

### **a. Faktor ekonomi**

#### **1) Sumber daya alam**

Sumber daya alam dalam jumlah yang besar sangat baik untuk mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi apalagi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Daerah dengan

---

<sup>147</sup> Veitzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas, dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 178

<sup>148</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik: Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Islam*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal. 68-69

<sup>149</sup>*Ibid.*, hal. 37-39

kemajuan ekonomi yang bagus secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya alam yang tepat dan efisien.

## 2) Sumber daya manusia

Faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah tidak hanya sekedar jumlah sumber daya manusia yang digunakan, akan tetapi lebih menekankan pada kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang digunakan maka menimbulkan efisiensi kerja, sehingga mampu untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan baik. Terciptanya kualitas SDM yang mumpuni dapat dilakukan dengan cara pembentukan modal SDM yang berupa peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dari sumber daya manusia.

## 3) Akumulasi modal

Faktor produksi diantara banyaknya faktor produksi salah satunya adalah modal. Seiring dengan permodalan yang digunakan dalam hal produksi semakin banyak, maka pada jangka waktu yang diharapkan dapat meningkatkan output, sehingga akumulasi modal menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

#### 4) Tenaga manajerial dan organisasi produksi

Tenaga manajerial dan organisasi produksi adalah hal yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. Organisasi produksi dan tenaga manajerial dapat menunjang kegiatan ekonomi melalui banyaknya dan penggunaannya faktor produksi sehingga kegiatan produksi akan lebih efisien dengan output yang efisien pula.

#### b. Pemanfaatan teknologi

Terjadinya pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas dan produktivitas akan lebih efisien jika diimbangi dengan penggunaan faktor produksi lainnya seperti modal dan tenaga kerja.

#### c. Skala produksi yang semakin luas dan pembagian kerja

Skala produksi yang semakin luas dan pembagian kerja berdasarkan ahli pada bidangnya masing-masing dalam produksi dapat meningkatkan produktivitas. Skala produksi dan pembagian kerja akan memberikan efek yang baik pada pertumbuhan ekonomi, karena produksi dengan skala yang besar akan menyebabkan produksi menjadi berkembang dan mengalami kemajuan.

#### d. Faktor non-ekonomi

##### 1) Administrasi dan politik

Administrasi dan politik utamanya yang ada di pemerintahan merupakan faktor pertumbuhan ekonomi khususnya

faktor non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena administrasi dan struktur pemerintahan yang lemah, karena guncangan politik yang cenderung tidak mengalami kestabilan secara keseluruhan dapat mengakibatkan kemunduran ekonomi.

## 2) Sosial budaya

Sosial budaya merupakan aspek yang berada di tengah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sosial budaya antara lain yaitu, pandangan masyarakat, tingkah laku, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat, dan lain-lain.

## 3) Tata tertib dan susunan hukum

Penyebab tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengakibatkan kemajuan ekonomi menjadi terhambat adalah tata tertib dan susunan hukum, peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaannya yang salah.

Pertumbuhan ekonomi selain beberapa faktor seperti yang telah disebutkan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu:<sup>150</sup>

### a. Sumber daya yang diinvestasikan

Sumber daya yang diinvestasikan merupakan sumber daya yang digunakan sebagai penggerak roda perekonomian yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.

---

<sup>150</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah . . .* hal. 22-26

b. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*

SDM dan *entrepreneur* merupakan faktor dari pertumbuhan ekonomi yang mampu menggerakkan sektor riil.

c. Teknologi dan inovasi

*Tekhnological progress* merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan menimbulkan efisiensi dan basis dari teknologi adalah inovasi

## I. Pendapatan Daerah

### 1. Keuangan Daerah

Fungsi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah akan berjalan secara optimal apabila diikuti dengan sumber penerimaan daerah yang cukup berdasarkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah berkaitan dengan sumber keuangan pada pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah akan menjadi sumber keuangan daerah. Daerah untuk mendapatkan sumber keuangan diberikan hak, antara lain:<sup>151</sup>

- a) Kepastian dalam pendanaan yang tersedia dari pemerintah sesuai dengan urusan yang telah diserahkan
- b) Kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak dan retribusi daerah

---

<sup>151</sup> Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 143

- c) Hak untuk mendapatkan bagi hasil yang berumber dari sumber daya nasional yang terdapat di daerah dan dana perimbangan lainnya
- d) Hak dalam mengelola kekayaan yang terdapat di daerah
- e) Hak untuk mendapatkan sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumber pembiayaan

Peraturan pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam undang-undang mengenai keuangan negara yang menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan dari presiden yang sebagian diserahkan kepada kepala masing-masing daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk mengelola keuangan daerah dan untuk mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan pemerintah daerah yang dipisahkan. Pengaturan pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada undang-undang mengenai keuangan negara dapat diketahui bahwa gubernur/bupati/walikota mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu bagian dengan pemerintah daerah, yaitu terdapat dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.<sup>152</sup>

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan atau kepentingan daerah telah sudah sejak zaman dahulu, terbukti pada zaman dahulu pendapatan

---

<sup>152</sup>*Ibid.*, hal. 143-144

yang didapatkan dari rampasan perang akan digunakan untuk keperluan negara, ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.<sup>153</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

*Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan tentang sumber pendapatan yang diterima oleh negara akan digunakan atau didistribusikan untuk kepentingan rakyat dan untuk pihak-pihak yang berhak menerima, salah satunya yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 adalah sumber pendapatan akan diberikan kepada orang-orang miskin.<sup>154</sup> Pendapatan yang diterima oleh negara atau daerah berguna untuk dialokasikan demi kepentingan dan keperluan negara atau daerah. Tujuan dari pendapatan yang dialokasikan untuk kepentingan dan keperluan adalah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, salah satunya adalah

<sup>153</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dahliyah: Al-Qur'an, Terjemah . . .* hal. 546

<sup>154</sup> Ruslan, *Ayat-Ayat Ekonomi . . .* hal. 45

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

## 2. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah adalah perhitungan anggaran pendapatan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota pada setiap tahun anggaran. Pendapatan daerah bersumber dari:<sup>155</sup>

### a) Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diterima dari hasil pungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam membiayai kegiatan untuk kepentingan dan keperluan daerah. PAD terdiri dari:

#### 1) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah terdiri dari dua bagian yaitu pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah dan pajak negara yang penggunaan dan pengelolaannya di berikan wewenang kepada daerah. Hasil dari pajak daerah adalah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain.

---

<sup>155</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019*, (Publikasi BPS, 19 Desember 2019), hal. 2-7

## 2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan hasil pungutan yang dilakukan oleh daerah dan diperoleh dari fasilitas atau jasa yang dibebankan kepada pembayar dan diberikan oleh pemerintah secara nyata dan langsung. Hasil pungutan dari retribusi daerah adalah seperti pertokoan atau pasar grosir, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, izin penggunaan tanah, dan lain-lain.

## 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil dari kekayaan daerah yang dikelola dan telah dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil dari kekayaan daerah yang dikelola dan telah dipisahkan terdiri dari laba lembaga keuangan bank dan non bank, laba perusahaan daerah air minum, laba atas penyertaan investasi yang diberikan kepada pihak ketiga, dan lain-lain.

## 4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan hasil dari kekayaan daerah yang telah dijual, tetapi tidak dapat dipisahkan, seperti pendapatan bunga, jasa giro, komisi, potongan ataupun bentuk lain dari pengadaan dan/atau penjualan dan/atau jasa daerah.

## b) Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang didapatkan dari pendapatan negara untuk diberikan wewenang kepada daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi dengan tujuan mendanai keperluan daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Bagi hasil pajak yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, penerimaan bea perolehan atas tanah dan bangunan.
  - 2) Bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari provisi sumber daya hutan, iuran hak pengusahaan hutan, pemberian hak atas negara, dan lain-lain.
  - 3) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan penggunaan dana untuk pemerataan dan kesenjangan fiskal dalam membantu pemerintah melaksanakan kemandirian melakukan tugas dan fungsi pemerintah melayani masyarakat.
  - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan khusus atau transfer yang bersifat khusus untuk penggunaan-penggunaan yang sudah ditentukan.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat atau dari instansi lainnya seperti dana hibah dan dana darurat dari pendapatan negara yang dialokasikan untuk daerah.

## J. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Secara Regional dan Spasial di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018” memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat diketahui berdasarkan variabel, metode, tahun dan lokasi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati dalam penelitiannya yang menguji pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis jalur menunjukkan hasil bahwa investasi dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.<sup>156</sup> Persamaan penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel yang digunakan dan lokasi yang menjadi penelitian. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari tenaga kerja dan variabel dependen yang terdiri dari

---

<sup>156</sup> Daftian Tri Prasetyawan, dkk, “Analisis Pengaruh Investasi . . . hal. 50

kemiskinan. Lokasi yang menjadi penelitian adalah Provinsi Jawa Timur. Perbedaan penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, metode, dan tahun. Penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati menggunakan variabel investasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel investasi. Penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati menggunakan metode analisis jalur, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan *geographically weighted regression* (GWR). Tahun yang digunakan dalam penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, sedangkan tahun dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tahun 2018.

2. Pratama, Kindangen, dan Walewangko dalam penelitiannya yang menguji pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan analisis path menunjukkan hasil bahwa secara parsial investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, serta tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>157</sup>

Persamaan penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko dengan

---

<sup>157</sup> Risky Pratama, dkk, "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19, No. 4, 2017, hal.

penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu tenaga kerja dan variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, metode, lokasi, dan tahun. Penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko menggunakan variabel independen yaitu investasi dan tingkat pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel independen investasi dan tingkat pendidikan, serta variabel dependen dalam penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko menggunakan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko menggunakan metode analisis path, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan *geographically weighted regression* (GWR). Lokasi penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko berada di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Pratama, Kindangen, dan Walewangko adalah tahun 2003-2015, sedangkan tahun dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tahun 2018.

3. Putra dan Arka dalam penelitiannya yang menguji pengaruh tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali dengan

menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan kesempatan kerja dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>158</sup> Persamaan penelitian Putra dan Arka dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari tingkat pengangguran terbuka dan variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah mregresi linear berganda. Perbedaan penelitian Putra dan Arka dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, metode, lokasi, dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Arka menggunakan variabel independen kesempatan kerja dan tingkat pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel kesempatan kerja dan tingkat pendidikan. Penelitian Putra dan Arka hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang menjadi penelitian Putra dan Arka adalah Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Putra dan Arka adalah tahun 2011 sampai

---

<sup>158</sup> I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat . . . hal. 416

dengan tahun 2016, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

4. Syaifullah dan Gandasari dalam penelitiannya yang menguji pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara serentak indeks pembangunan manusia dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>159</sup> Persamaan penelitian Syaifullah dan Gandasari dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari indeks pembangunan manusia dan pengangguran, serta variabel dependen yang yaitu kemiskinan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Syaifullah dan Gandasari dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode lokasi, dan tahun. Penelitian Syaifullah dan Gandasari hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang menjadi penelitian Syaifullah dan Gandasari adalah Provinsi Banten, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun

---

<sup>159</sup> Syaifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten", *JEQU*, Vol 6, No. 2, Oktober 2016, hal. 236-237

yang digunakan dalam penelitian Syaifullah dan Gandasari adalah tahun 2008-2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

5. Putri dan Yuliarmi dalam penelitiannya yang menguji beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>160</sup> Persamaan penelitian Putri dan Yuliarmi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan adalah variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran serta variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan Putri dan Yuliarmi terletak pada variabel, metode, lokasi, dan tahun. Penelitian Putri dan Yuliarmi menggunakan variabel independen yaitu pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan pendidikan dalam

---

<sup>160</sup> I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Beberapa Faktor yang . . . hal. 444-446

variabel independen. Penelitian Putri dan Yuliarmi hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang digunakan penelitian oleh Putri dan Yuliarmi adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Putri dan Yuliarmi adalah tahun 2007 sampai dengan 2011, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

6. Andykha, Handayani, dan Woyanti dalam penelitiannya yang menguji pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan hasil bahwa secara simultan PDRB, tingkat pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Analisis secara parsial menunjukkan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>161</sup> Persamaan penelitian Andykha, Handayani, dan Woyanti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri PDRB yang dilihat dari laju pertumbuhannya atau

---

<sup>161</sup> Rydho Andykha, dkk, "Analisis Pengaruh PDRB . . . hal. 119-122

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan IPM, serta variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Perbedaan penelitian Andykha, Handayani, dan Woyanti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode, lokasi, dan tahun. Penelitian Andykha, Handayani, dan Woyanti menggunakan metode data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang menjadi penelitian Andykha, Handayani, dan Woyanti adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Andykha, Handayani, dan Woyanti adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

7. Agustina, Syechalad, dan Hamzah dalam penelitiannya yang menguji pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>162</sup> Persamaan penelitian Andykha Agustina, Syechalad, dan Hamzah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode. Variabel yang digunakan adalah

---

<sup>162</sup> Eka Agustina, dkk, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4, No. 2, September 2018, hal. 276-278

variabel independen yang terdiri jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, serta variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, metode, lokasi, dan tahun. Penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah menggunakan variabel independen tingkat pendidikan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah menggunakan hanya menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang menjadi penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah di Provinsi Aceh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Agustina, Syechalad, dan Hamzah adalah tahun 1996-2015, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

8. Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati dalam penelitiannya yang menguji perbandingan model GWR dengan *fixed* dan *adaptive bandwidth* untuk persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi global dengan regresi berganda menunjukkan hasil bahwa secara global IPM dan upah minimum regional mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan keluarga pra sejahtera, kepadatan penduduk, dan TPAK berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Analisis GWR menunjukkan hasil bahwa IPM, kepadatan penduduk, dan TPAK berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin pada Kabupaten Cilacap, sedangkan keluarga prasejahtera, dan upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin pada Kabupaten Cilacap.<sup>163</sup> Persamaan penelitian Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari IPM, kepadatan penduduk, dan upah minimum, serta variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dan GWR. Perbedaan penelitian Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, lokasi, dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati menggunakan variabel independen keluarga prasejahtera dan TPAK, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel keluarga prasejahtera dan TPAK. Lokasi yang menjadi penelitian Pamungkas, Yasin, dan Rahmawati adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Putra dan Arka adalah tahun 2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

---

<sup>163</sup> Rifki Adi Pamungkas, dkk, "Perbandingan Model GWR . . . hal. 542-544

9. Windra, Marwoto, dan Rafani dalam penelitiannya yang menguji pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Analisis secara parsial menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, tetapi inflasi mempunyai kecenderungan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, serta tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.<sup>164</sup>
- Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Windra, Marwoto dan Rafani terletak pada variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran serta variabel dependen yaitu kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linear berganda. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Windra, Marwoto, dan Rafani adalah terletak pada variabel, metode, lokasi dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Windra, Marwoto, dan Rafani menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan tidak menggunakan variabel inflasi

---

<sup>164</sup> Windra, dkk, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK, Vol. 14, No. 2, November 2016, hal. 21-26

sebagai variabel independen. Penelitian Windra, Marwoto, dan Rafani hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang digunakan dalam penelitian Windra, Marwoto, dan Rafani adalah Indonesia, sedangkan lokasi yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Windra, Marwoto dan Rafani adalah tahun 2001 sampai dengan tahun 2015, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tahun 2018.

10. Ridwan, Syaparuddin, dan Chandra dalam penelitiannya yang menguji sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa secara simultan pendapatan pemerintah daerah yang merupakan sumber pembiayaan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial pendapatan pemerintah daerah seperti pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah mempunyai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jambi, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan pendapatan pemerintah daerah yang merupakan sumber pembiayaan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara parsial pendapatan pemerintah daerah seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan

pendapatan lain yang sah mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Jambi.<sup>165</sup> Persamaan penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri pendapatan pemerintah daerah dan variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Perbedaan penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel, metode, lokasi, dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika menggunakan variabel PDRB sebagai variabel dependen, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan tidak menggunakan variabel PDRB sebagai variabel dependen. Penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika menggunakan metode regresi data panel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang menjadi penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Ridwan, Syaparuddin, dan Mustika adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

11. Agustina, Wasono, dan Darsyah dalam penelitiannya yang menguji tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan regresi linear berganda dan *geographically weighted regression* menunjukkan hasil

---

<sup>165</sup> Agung Ridwan, dkk, "Pengaruh Sumber Pembiayaan . . . hal. 95-97

bahwa penelitian menunjukkan hasil bahwa model GWR lebih baik dibandingkan dengan regresi linear berganda dan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan secara spasial adalah upah minimum kerja, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, pelayanan kesehatan jamkesmas, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban, dan inflasi, serta secara spasial menunjukkan perbedaan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah.<sup>166</sup> Persamaan penelitian Agustina, Wasono, dan Darsyah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yaitu upah minimum. Metode yang digunakan regresi linear berganda dan analisis GWR. Perbedaan penelitian Agustina, Wasono, dan Darsyah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen, lokasi, dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Wasono, dan Darsyah menggunakan variabel independen persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, angka partisipasi murni, persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan jamkesmas, pengeluaran perkapita, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban, luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup>, laju inflasi, dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, angka partisipasi murni, persentase penduduk yang

---

<sup>166</sup> Monica Firda Agustina, dkk, "Pemodelan *Geographically Weighted Regression* (GWR) Pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Statistika Universitas Muhamadiyah Semarang*, Vol 3, No. 2, 2015, hal. 69-73

mendapatkan pelayanan jamkesmas, pengeluaran perkapita, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban, luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup>, laju inflasi, dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Lokasi yang menjadi penelitian Agustina, Wasono, dan Darsyah adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Agustina, Wasono, dan Darsyah adalah tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

12. Susanti, Lestia, dan Sukmawaty dalam penelitiannya yang menguji tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan analisis GWR menunjukkan hasil bahwa Penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty dengan dimasukkannya faktor geografis menunjukkan hasil bahwa secara spasial yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, dan persentase balita kekurangan gizi.<sup>167</sup> Persamaan penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari tingkat pengangguran terbuka, tenaga kerja, dan kepadatan penduduk, serta variabel dependen yang terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah analisis GWR. Perbedaan penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty dengan penelitian

---

<sup>167</sup> Dewi Sri Susanti, dkk, "Pemodelan Tingkat Kesejahteraan . . . hal. 184-191

yang akan dilakukan teletak pada variabel independen, lokasi, dan tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Lestia, dan Sukmawaty menggunakan variabel independen melek huruf, angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi, persentase balita kekurangan gizi, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel melek huruf, angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi, persentase balita kekurangan gizi, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Lokasi yang menjadi penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Susanti, Lestia, dan Sukmawaty adalah tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun 2018.

13. Romi dan Umiyati dalam penelitiannya yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi dengan menggunakan metode regresi linear berganda dalam bentuk semilog menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial upah minimum berpengaruh secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.<sup>168</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Romi dan Umiyati dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada variabel dan metode yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum serta variabel dependen terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian Romi dan Umiyati dengan penelitian yang akan diteliti adalah regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Romi dan Umiyati dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode, lokasi dan tahun. Penelitian Romi dan Umiyati hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang digunakan dalam penelitian Romi dan Umiyati berada di Kota Jambi, sedangkan penelitian yang akan diteliti berada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Tahun yang digunakan dalam penelitian Romi dan Umiyati adalah tahun 2001 sampai dengan 2015, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tahun 2018.

14. Suyono dalam penelitiannya yang menguji pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan dengan menggunakan metode regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap tingkat

---

<sup>168</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi", *e-Journal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 7 No. 2, April 2018, hal. 1

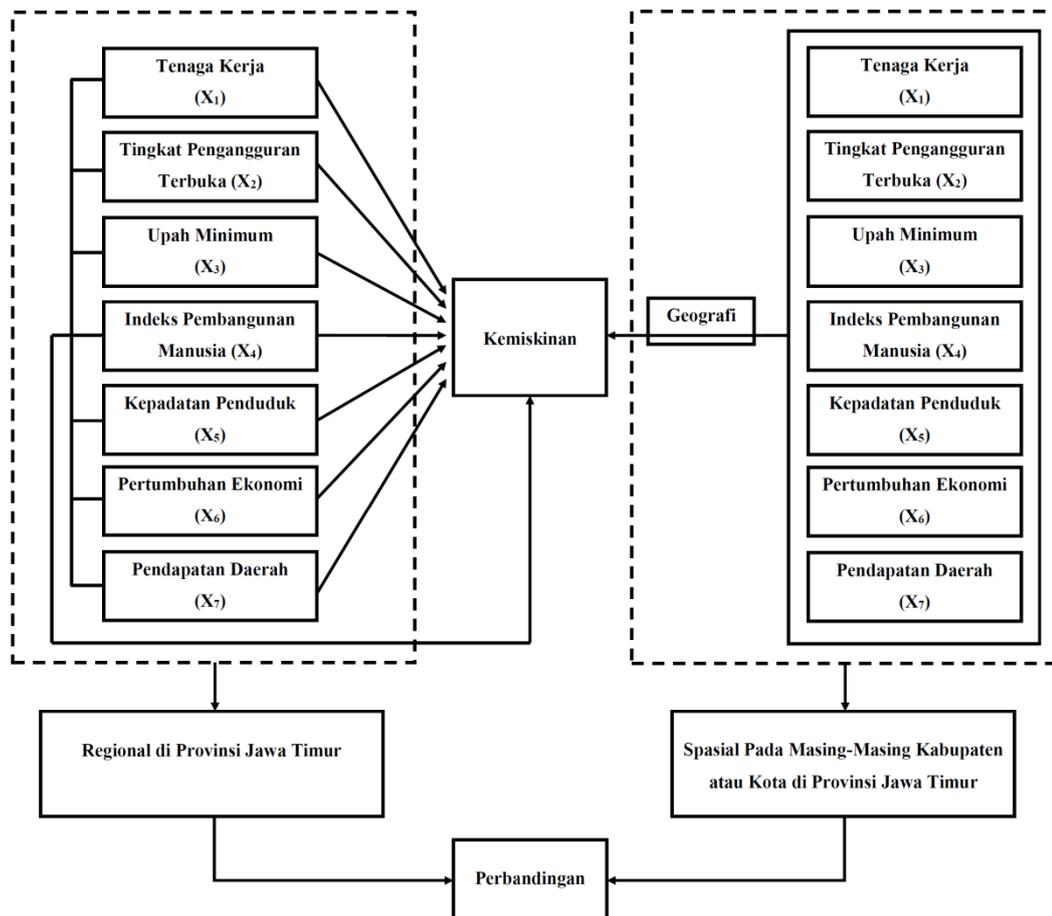
kemiskinan di Kabupaten Magetan, sedangkan secara simultan terdapat pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan, serta variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan adalah inflasi.<sup>169</sup> Persamaan penelitian Suyono dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada variabel dan metode yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari upah minimum dan pertumbuhan ekonomi serta variabel dependen terdiri dari kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian Suyono dan penelitian yang akan dilakukan adalah regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Suyono dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada variabel independen, metode, dan lokasi. Penelitian Suyono menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen, sedangkan di penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan variabel inflasi. Penelitian Suyono hanya menggunakan metode regresi linear berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan GWR. Lokasi yang digunakan dalam penelitian Suyono berada di Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>169</sup> Bambang Suyono, "Pengaruh Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magetan", *Ekomaks: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, hal. 43-47

## K. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Kerangka konseptual yang ada dalam penelitian ini didukung atas dasar teori dan kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Y : Rokib<sup>170</sup>, Adisasmita<sup>171</sup>, Susanti, dkk<sup>172</sup>

$X_1$  : Huda<sup>173</sup>, Pascual dalam penelitian Ratih, dkk<sup>174</sup>Prasetyawan, dkk<sup>175</sup>

<sup>170</sup> Mohammad Rokib, *Teologi Bencana: Studi . . .* hal. 92

<sup>171</sup> Rahardja Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi . . .* hal. 163

<sup>172</sup> Dewi Sri Susanti, dkk, "Pemodelan Tingkat Kesejahteraan . . . hal. 184-191

<sup>173</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: . . .* hal 227

<sup>174</sup> Gusti Ayu Putra Ambara Ratih, dkk, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran . . . hal. 36

- X<sub>2</sub> : Hisyam<sup>176</sup>, Zaini<sup>177</sup>, Putra dan Arka<sup>178</sup>,
- X<sub>3</sub> : Adisu<sup>179</sup>, Berenschot dan Klinken<sup>180</sup>, Putri dan Yuliaarmi<sup>181</sup>
- X<sub>4</sub> : Suparmoko dan Yusuf<sup>182</sup>, Tambotot dan Manongko<sup>183</sup>, Andykha, dkk<sup>184</sup>
- X<sub>5</sub> : Ruslan<sup>185</sup>Sjafrizal<sup>186</sup> Pamungkas, dkk<sup>187</sup>
- X<sub>6</sub> : Hisyam<sup>188</sup>Hidayat<sup>189</sup> Schumpeter dalam bukunya Tarigan<sup>190</sup>,Windra,  
dkk<sup>191</sup>,
- X<sub>7</sub> : Pasal 1 poin 35 UU No. 23 Tahun 2014<sup>192</sup>, Todaro dalam penelitian  
Mustamin, dkk<sup>193</sup> Ridwan, dkk<sup>194</sup>

#### L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang bersifat teoritis dalam bentuk jawaban yang praktis terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam

- 
- 175 Daftian Tri Prasetyawan, dkk, "Analisis Pengaruh Investasi . . . hal. 49
- 176 Ali Ibrahim Hisyam, *Ekonomi Makro* . . . hal. 21.
- 177 Ahmad Zaini, *Pengembangan Sektor Unggulan* . . . hal. 117
- 178 I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat . . . hal. 416
- 179 Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas* . . . hal. 4
- 180 Ward Berenschot dan Gerry Van Klinken, *Citizenship in Indonesia* . . . hal. 180
- 181 I.A Septyana Mega Putri dan Yuliarmi, "Beberapa Faktor yang . . . hal. 444-446
- 182 M. Suparmoko dan Furtasan Ali Yusuf, *Perekonomian Indonesia Edisi* . . . hal. 293
- 183 Henry J.D Tambotot dan Allen A. Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan*. . . hal. 38
- 184 Rydho Andykha, dkk, "Analisis Pengaruh PDRB . . . hal. 120
- 185 Ruslan, *Ayat-Ayat Ekonomi* . . .
- 186 Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan* . . . hal. 124
- 187 Rifki Adi Pamungkas, dkk, "Perbandingan Model GWR . . . hal. 544
- 188 Ali Ibrahim Hisyam, *Ekonomi Makro* . . . hal. 231
- 189 Wahyu Hidayat, *Perencanaan Pembangunan Daerah*: . . . hal. 151
- 190 Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori* . . . hal. 55
- 191 Windra, dkk, "Analisis Pengaruh Inflasi . . . hal. 21-26
- 192 Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 23* . . . hal.12
- 193 Siti Wilda, dkk, "Pengaruh Variabel Makro . . . hal. 166
- 194 Agung Ridwan, dkk, "Pengaruh Sumber Pembiayaan . . . hal 97-99

penelitian ini.<sup>195</sup> Hipotesis berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1.  $H_0$  : tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa timur  
 $H_1$  : tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
2.  $H_0$  : tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_2$  : tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3.  $H_0$  : upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_3$  : upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
4.  $H_0$  : indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_4$  : indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
5.  $H_0$  : kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_5$  : kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

---

<sup>195</sup> Rokhmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal. 54-55

6.  $H_0$  : pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_6$  : pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
7.  $H_0$  : pendapatan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  
 $H_7$  : pendapatan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
8.  $H_0$  : Tidak terdapat satupun variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan sebagai variabel terikat di Provinsi Jawa Timur  
 $H_8$  : Paling tidak terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan sebagai variabel terikat di Provinsi Jawa Timur
9.  $H_0$  : Tidak terdapat parameter yang berpengaruh secara signifikan terhadap model kemiskinan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur  
 $H_9$  : Terdapat beberapa parameter yang berpengaruh secara signifikan terhadap model kemiskinan pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur
10.  $H_0$  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi global (regional di Provinsi Jawa Timur) dengan model regresi *geographically*

*weighted regression* (spasial pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur)

$H_{10}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi global (regional di Provinsi Jawa Timur) dengan model regresi *geographically weighted regression* (spasial pada masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur)